ekonen | Jurnal Ilmiah Ekomen ISSN-p 1693-9131

Analisis Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Poso

Yaviza Nurmalasari Kaiya[1]
[1]Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat realisasi penyerapan anggaran dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk mencapai optimalisasi penyerapan anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Poso. Data yang digunakan adalah primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu Pagu dan Realisasi Anggaran dari Online Monitoring SPAN (OMSPAN) dan Laporan Capaian IKU kualitas pelaksanaan anggaran dengan sampel data periode semester I dan II Tahun 2021 dan periode semester I Tahun 2022. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat realisasi anggaran perjenis belanja pada semester I Tahun 2022 total sebesar 41.73% dan mengalami penurunan pada semester I 2022 sebesar 39.53%. Faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan ini ialah KPPN Poso Tipe A1 Poso merupakan kantor vertikal yang terdapat rotasi mutasi pegawai yang menyebabkan pembayaran uang makan dan lembur menjadi naik turun. Hal ini berkaitan juga dalam penyerapan belanja barang dimana pada wilayah vertikal KPPN Poso pada masa kasus pandemi covid cenderung menurun sehingga pengadaan barang/jasa protokol kesehatan tidak terlalu banyak dan di wilayah vertikal KPPN Poso masih minim untuk penyediaan barang/jasa oleh vendor atau pihak ketiga dan sehingga pengadaan barang/jasa dilakukan pengiriman dari luar kota. Dalam belanja modal juga berkaitan karena di wilayah vertikal KPPN Poso tidak banyak kontraktor untuk bekerja sama dalam pemeliharaan rehabilitasi gedung/bangunan kantor maupun rumah dinas sehingga terdapat kendala terkait pengadaan material dan pekerja serta faktor alam. Disamping itu penyerapan anggaran pada KPPN Poso memiliki target IKU sebesar 95.5% yang di dukung 13 indikator salah satunya penyerapan anggaran untuk tahun 2021-2022. Meskipun mengalami penurunan pada periode semester I Tahun 2022, realisasi pelaksanaan anggaran KPPN Poso dalam realisasinya mencapai target IKU pada periode semester I tahun 2021 sebesar 99.98%, semester II tahun 2021 sebesar 95.60% dan pada periode semester I Tahun 2022 sebesar 98%. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat penyerapan anggaran tahun 2021 dan 2022 masih tergolong sangat baik. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi semua pihak.

Kata Kunci : Anggaran, Realisasi, Belanja Pemerintah

AFILIASI:
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah - Indonesia

***EMAIL KORESPONDENSI:**
kaiayaviza96@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL:
Diterima:
3 November 2022
Disetujui:
28 November 2022

© 2022 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Pendahuluan

Anggaran adalah pernyataan kinerja yang diharapkan akan dicapai selama periode waktu yang telah ditentukan, dinyatakan dalam istilah keuangan. Anggaran merupakan alat birokrasi yang digunakan di sektor publik yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik yang digunakan untuk melaksanakan prakarsa yang dibayar dengan menggunakan dana publik. Anggaran juga diperlukan untuk mengalokasikan dana untuk setiap program atau kegiatan yang signifikan (Halim & Kusufi, 2014)

Terdapat tiga Peraturan Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Perekonomian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2023 dalam upaya untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara. Penerapan undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Susanto, 2006). Dalam kondisi ini, proses penyerapan belanja publik yang dinamis dan terorganisir menjadi penting untuk mempercepat pembangunan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi (Carsidiawan, 2009). Sebagai salah satu indikator evaluasi kinerja atas pelaksanaan yang dilakukan dalam rangka menciptakan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan capaian outputnya, penyerapan anggaran menjadi tolak ukur efektivitas pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia. Tergantung dari acuannya, penyerapan anggaran dalam penilaiannya mengungkapkan apakah efektif atau tidak. Sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam kaitannya dengan memaksimalkan penyerapan anggaran. Masalah penyerapan anggaran selalu menjadi tantangan di Indonesia setiap tahunnya. Segala upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan seefektif mungkin. Pelaksanaan penyerapan anggaran, yaitu pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang direalisasikan secara bertahap, seringkali mengalami keterlambatan. Dalam situasi ini, pemerintah sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya manusia untuk meningkatkan taraf hidup di lingkungan sekitar. Jika dilakukan dengan sukses dan efisien, hal ini dapat dicapai.

Pada KPPN Tipe A1 Poso, penyerapan anggaran biasanya menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam pencairan dana atau penyerapan anggaran setiap bulan dalam tahun anggaran. Hal ini disebabkan pelaksanaan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disusun oleh Pengguna Anggaran dan disetujui oleh Menteri Keuangan kurang lancar. Karena proses yang belum matang atau anggaran pemerintah pusat yang belum optimal dilaksanakan, terdapat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan anggaran pemerintah secara efektif dan efisien sebagaimana dimaksud. Dari studi ini, penting untuk membandingkan peningkatan penyerapan anggaran pemerintah dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan pimpinan untuk memastikan penyerapan anggaran seefisien mungkin.

Belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam memegang kondisi perekonomian negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu wujud mengelola keuangan negara salahsatunya yaitu belanja pemerintah. Belanja pemerintah

didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk mendukung stabilitas keuangan daerah dan tugas-tugas pemerintah pusat. Belanja negara meliputi transfer ke daerah dan belanja pemerintah pusat. Yang dimaksud dengan "jenis belanja" dalam APBN adalah jenis belanja pemerintah pusat di Kementerian/Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain, dan Transfer ke Daerah, digunakan untuk mengkategorikan belanja pemerintah pusat dalam APBN. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Poso yang terletak di Jl. Kalimantan No. 16, Gebang Rejo, Poso Kota, berperan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara yang menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah Kementerian/Lembaga ataupun dibawah Kementerian Keuangan. KPPN Tipe A1 Poso memiliki tanggung jawab menyalurkan anggaran sesuai dengan peruntukannya yang tertuang dalam UU APBN termasuk KPPN Poso itu sendiri yang di monitoring langsung melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA digunakan untuk menilai kualitas kinerja anggaran Kementerian Negara dan Lembaga dalam hal kepatuhan perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan regulasi, dimana indikator tersebut meliputi indikator anggaran. Hal ini dapat digunakan untuk menilai apakah telah terjadi kenaikan atau penurunan optimalisasi penyerapan realisasi anggaran pemerintah dari waktu ke waktu. Pengujian Perintah Pembayaran Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara Atas Nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), Penyaluran Pembiayaan Atas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara merupakan fungsi dari KPPN Tipe A1 Poso.

Landasan Teori

Selain permintaan sektor rumah tangga terhadap barang dan jasa konsumsi, permintaan sektor bisnis terhadap barang investasi, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa, serta ekspor dan impor sektor luar negeri, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara makroekonomi (Dumairy (2006).

Secara teoritis, mengendalikan pengeluaran pemerintah adalah semacam kebijakan fiskal yang melibatkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pengeluaran pemerintah atau kebijakan fiskal dapat menjadi salah satu tugas yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli dan menyediakan jasa, dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoebroto, 2002).

Menurut Boediono (1998), ada tiga kategori pengeluaran pemerintah yang dapat diklasifikasikan dalam konteks ekonomi makro sebagai berikut:

a) Pengeluaran pemerintah untuk perolehan barang dan jasa.
b) Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan.

c) Pengeluaran pemerintah untuk bantuan sosial dan modal untuk membantu membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

Pengertian Anggaran

Anggaran adalah pernyataan kinerja yang diantisipasi yang akan dicapai selama periode waktu yang telah ditentukan yang dinyatakan dalam istilah moneter. Baik di sektor publik maupun swasta, anggaran digunakan sebagai alat kontrol manajemen yang sangat efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi (Wati et al, 2013).

Sementara itu, ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas di sektor anggaran publik untuk penggunaan dana publik dan pelaksanaan program yang menggunakan dana publik. Anggaran merupakan mekanisme pengalokasian dana untuk setiap program atau kegiatan yang signifikan pula (Halim & Kusufi, 2014).

Dari berbagai pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana kegiatan perusahaan dalam pengambilan keputusan dan mengelola biaya dari pihak tertentu yang bertugas untuk mengawasi dan mengkoordiasi atas perencanaan tersebut. Anggaran diartikan juga sebagai rencana keuangan dari suatu organisasi yang mencakup perkiraan pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk dapat membiayai program kegiatan dalam periode waktu tertentu.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) memuat pagu anggaran satuan kerja. DIPA adalah dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan disetujui oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA memuat rincian satuan anggaran yang dapat diukur yang menjadi landasan pelaksanaan operasional dan penggunaan anggaran, dan berlaku untuk satu tahun anggaran.

DIPA dapat digunakan sebagai alat untuk akuntansi pemerintah serta untuk mengelola, melaksanakan, melaporkan, dan memantau. Pagu anggaran yang realisasinya dalam DIPA adalah batas maksimal yang diperbolehkan, harus dilaksanakan dengan sempurna.

Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan pencapaian realisasi dari perkiraan yang di capai selama periode menurut Halim (2014: 84).

Perencanaan anggaran, stimulasi dan persetujuan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengendalian anggaran, dan penyerapan anggaran merupakan langkah awal dalam siklus penyerapan. Kinerja pemerintah akan ditentukan oleh seberapa banyak tujuan yang telah dicapai, menurut Mardiasmo (2009:72). Menganalisis perbedaan antara kinerja aktual dan yang diantisipasi adalah bagaimana kinerja dievaluasi. Misalnya, belanja barang dan jasa yang secara signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah perlu memiliki rencana pengelolaan yang solid

untuk memastikan bahwa ia beroperasi secara efisien dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Meskipun penilaian anggaran tidak sepenuhnya dilakukan, diharapkan penyerapan anggaran akan dapat menutupi setidaknya 80% dari anggaran aktual yang telah dialokasikan.

Belanja Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2002:47) belanja pemerintah ialah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran melebihi periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak dapat diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Belanja pemerintah merupakan pengeluaran dari pemerintah berupa direct expense maupun indirect expense yang digunakan untuk operasional pemerintahan maupun penyelenggaraan program pemerintah. Belanja pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja operasional dan belanja modal yang dapat mendukung jalannya kegiatan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Belanja Pemerintah dikelompokkan menjadi : belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga utang/kewajiban, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah jenis belanja pemerintah yang dapat digunakan untuk membayar santunan kepada pegawai negeri, pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyelenggara negara, dan pegawai negeri yang bekerja. perjanjian (PPPK), baik simpanan dalam negeri maupun luar negeri, sebagai akibat dari tidak meratanya pembagian pekerjaan yang telah dilakukan dalam mendukung tugas dan fungsi pemerintahan.

b) Belanja Barang

Belanja barang termasuk membayar pengeluaran perjalanan serta bahan habis pakai untuk pembuatan barang dan jasa yang dipasarkan dan dibeli untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat umum. Pengeluaran barang ini meliputi pembelian barang dan jasa, pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, dan pembelian barang untuk didistribusikan kepada masyarakat umum.

c) Belanja Modal

Dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran keuangan yang melebihi nilai kapitalisasi minimum aset tetap atau aset lain yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pembelian atau penambahan aset dan/atau aset lain yang dapat memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan). Aset tetap digunakan untuk operasional satuan kerja operasional atau tersedia untuk kepentingan umum, dan dicatat dalam neraca satuan kerja Kementerian/Lembaga.

d) Belanja pembayaran bunga utang/kewajiban

Pengeluaran bunga atas utang dan kewajiban mencakup utang dalam negeri dan luar negeri, dan dapat dihitung berdasarkan apakah utang itu jangka pendek atau jangka panjang. Bunga dibayarkan atas kewajiban untuk menggunakan pokok utang. Selain itu, pengeluaran untuk pembayaran bunga utang/kewajiban dapat digunakan untuk pembayaran denda/biaya lain yang terkait dengan pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, serta penyeimbangan bunga. jenis dana publik yang digunakan khusus untuk prakarsa dari anggaran Bendahara Umum Negara.

e) Belanja Subsidi

Pengeluaran subsidi oleh pemerintah mengacu pada distribusi uang dari lembaga di dalam pemerintah atau dari sumber luar untuk tujuan produksi, pemasaran, ekspor, atau impor produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk dengan biaya lebih rendah dari pasar. harga. Antara lain, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara menggunakan subsidi pengeluaran ini untuk menyalurkan subsidi kepada masyarakat luas melalui badan usaha milik negara dan/atau jasa perusahaan swasta dan badan usaha swasta.

f) Belanja Hibah

Pengeluaran hibah adalah pengeluaran uang, produk, atau layanan sebagai hadiah kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah regional, atau bisnis negara bagian atau regional untuk siapa alokasi tertentu telah ditetapkan. Pengeluaran hibah ini tidak berlangsung kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dan didukung oleh naskah kesepakatan antara pemerintah sebagai pemberi hibah dan unit organisasi sebagai penerima hibah. Juga tidak mengikat dan tidak wajib.

g) Belanja Bantuan Sosial

Untuk melindungi dari potensi risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat mengirimkan dana, barang, atau jasa kepada masyarakat melalui program bantuan sosial.

h) Belanja Lain-lain

Pengeluaran lainnya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah federal yang tidak dapat dikategorikan di bawah kategori pengeluaran pemerintah tersebut di atas. Seperti penanganan bencana alam, bencana sosial, dan biaya tak terduga lainnya yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan inisiatif pemerintah, pengeluaran ini jarang terjadi dan diperkirakan tidak akan terulang kembali. Belanja ini harus segera dilakukan dan tidak bisa direncanakan sebelumnya

Metode Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tipe A1 Poso yang berlokasi di Jalan Pulau Kalimantan Nomor 16, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Peneliti memilih tempat tersebut dengan pertimbangan bahwa KPPN Tipe A1 Poso merupakan salah satu kantor vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang melayani penyaluran dana APBN serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Waktu penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan terhitung sejak bulan Juli sampai Agustus 2022.

Populasi Dan Sampel

Dalam Kuntjojo (2009), jumlah satuan individu yang karakteristiknya akan diteliti merupakan definisi dari populasi menurut Djarwranto (1994). Unit individu berupa unit analisis, yang dapat berupa individu, kelompok, tempat, benda, dll. 34 Kantor Wilayah dan 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terdaftar sebagai Instansi Vertikal di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait Nomor 262/PMK.01/2016.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Poso yang merupakan salah satu unit organsiasi vertikal Non Provinsi yang menjadi KPPN Percontohan pada Tahun 2012 kemudian menjadi kantor vertikal dibawah Ditjen Perbendaharaan sampai sekarang.

Pada penelitian ini penulis mengambil sampel per semester dari yaitu semester I dan semester II Tahun Anggaran 2021 dan semester II Tahun Anggaran 2022

Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata, skema dan gambar dan metode data deskriptif.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan diperoleh dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Poso untuk di analisis lebih lanjut, sebagai berikut:

a) Data Primer

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Poso merupakan lokasi penelitian, dan data primer adalah data yang dapat dikumpulkan langsung dari sana. Wawancara langsung dengan informan digunakan untuk mengumpulkan data primer di lokasi penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa data dokumentasi literature, artikel, jurnal, dan situs-situs di internet yang berkenaan dengan analisis yang dilakukan berupa data realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah yang memuat pagu dan realisasi belanaja pemerintah Januari 2021- Juni 2022 dari Online Monitoring SPAN (OMSPAN)

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Data yang diolah menjadi pedoman penyelesian penelitian yang yang telah disebutkan sebelumnya. Proses analisis ini dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu:

a) Pengumpulan Data
b) Menjelaskan data yang sudah ada
c) Menganalisis data yang diperoleh sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan di unit organisasi, data-data tersebut adalah data Pagu dan Realisasi dan Laporan Realisasi Anggaran belanja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tipe A1 Poso.
d) Mengambil Kesimpulan

Adapun yang terkait dengan metode analisa deskriptif kualitatif untuk mendapat tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja dalam penelitian ini dengan rumus:

$$\text{Capaian/Output} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Pagu Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Definisi Operasional Variabel

Untuk mempermudah proses analisis, variabel harus memiliki definisi operasional yang tepat berdasarkan sifat uniknya. Sebuah ide abstrak, definisi operasional memudahkan untuk mengukur suatu variabel atau operasional dan dapat digunakan sebagai pedoman ketika melakukan kegiatan kerja penelitian.

Definisi dan sejauh mana realisasi penyerapan anggaran digunakan dalam analisis. Dimana tingkat penyerapan anggaran belanja dalam UU Perbendaharaan yang membatasi masa berlaku anggaran pada tahun tertentu. Hal ini di dukung dari adanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di setiap tahun. Dimana di dalam DIPA berisi pagu anggaran unit organisasi dalam satu tahun. Dalam implementasi penyerapan anggaran diperlukan kebijakan perencanaan penyerapan belanja pemerintah oleh KPA, PPK, PPSPM, PBJ, dan Bendahara. Kebijakan tersebut berkaitan dengan menentukan prioritas pengadaan barang dan jasa pada tahun tersebut. Kemudian adanya proses realisasi penyerapan anggaran dengan melakukan tahapan pengujian serta embelian barang dan jasa oleh tim pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa, setelah itu dilakukan proses pencairan dana pembayaran barang dan jasa kepada pihak ketiga/penerima oleh Bendahara Pengeluaran dilanjut dengan proses pengajuan Surat Perintah membayar Uang Persediaan (SPM GUP) ke seksi pencairan dana KPPN Tipe A1 Poso hingga terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan penelitian yang dilakukan KPPN Tipe A1 Poso diperoleh sumber data berupa tabel Anggaran Perjenis Belanja DIPA Satker di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso, digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Anggaran Perjenis Belanja Satker di KPPN Poso periode Semester I & II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022
(dalam rupiah)

Tahun 2021									
No	Jenis Belanja	Anggaran		Reallisasi		Sisa Anggaran		% Persentase Realisasi Anggaran	
		Smt I	Sm II	Smt I	SmtII	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II
1.	Belanja Pegawai	226,272,000	226,272,000	87,363,000	138,314,000	138,909,000	87,958,000	38.6 %	61.13 %
2.	Belanja Barang	1,284,351,000	1,284,351,000	652,962,028	613,485,222	631,388,972	670,865,778	50.84 %	47.77 %
3.	Belanja Modal	900,817,000	900,817,000	265,929,700	633,389,350	634,887,300	267,427,650	29.52 %	70.31 %
Total		2,411,440,000	2,411,440,000	1,006,254,728	1,385,188,572	1,405,185,272	1,026,251,428	41.73 %	57.44 %

Semester I Tahun 2022					
No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Persentase Realisasi Anggaran
1.	Belanja Pegawai	259,695,000	86,847,000	172,848,000	33.44%
2.	Belanja Barang	1,274,243,000	638,527,153	635,715,847	50.11%
3.	Belanja Modal	349,786,000	19,284,190	330,501,810	5.51%
Total		1,883,724,000	744,658,343	1,139,065,657	39.53%

Sumber: Data Online Monitoring SPAN (OMSPAN)

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa urutan terbesar jumlah anggaran belanja ialah belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Terlihat pada Semester I tahun 2021 untuk belanja pegawai yang telah terealisasi sebesar Rp 87,363,000 (38,6%), sedangkan belanja pegawai di semester I Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 86,847,000 (33,44%) selisih hanya 5,16%. Pada semester I Tahun 2021 belanja barang yang terealisasi sebesar Rp 652,962,028 (50,84%), sedangkan di semester I tahun 2022 hanya 638,527,153 (50,11%) selisihnya sebesar 0,73%. Disamping itu juga di semester I

tahun 2021 belanja modal terelaisasi sebesar Rp 265,929,700 (29.52%) dan di semester I tahun 2022 realisasi anggaran belanja modal sebesar Rp19,284,190 (5,51%) sehingga selisihnya sebesar 24,01%.

Analisis Data

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dimana penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator capaian kualitas pelaksanaan anggaran mengalami perubahan bobot nilai pada masing-masing indikator. Pada indikator penyerapan anggaran tahun 2021 sebesar 15% sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi 20%. Sehingga penyerapan anggaran di KPPN Poso memiliki target IKU sebesar 95.5% yang didukung 13 indikator salah satunya indikator penyerapan anggaran untuk tahun 2021-2022. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas dan efisensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap kebijakan.

Hal tersebut diartikan bahwa jika realisasi penyerapan anggaran pada tahun berjalan melebihi target IKU yaitu 95.5% dengan perhitungan nilai dengan bobot yang ditetapkan, maka kualitas capaian kinerja penyerapan anggaran pada KPPN Poso dapat dikatakan sangat baik. Jika persentase kualitas realisasi penyerapan anggaran di bawah target maka perlu diadakan evaluasi mengenai pelaksanaan anggaraan pada KPPN Tipe A1 Poso.

Pelaksanaan Anggaran Pagu Belanja dan Realisasi Penyerapan Anggaran di KPPN Poso pada masing-masing belanja pemerintah

Anggaran Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai

Pada semester I Tahun 2021, anggaran belanja pegawai merupakan komposisi belanja yang paling kecil dalam DIPA Tahun 2021 pada KPPN Tipe A1 Poso yang mencapai Rp 226,272,000 yang sudah terealisasi sebesar Rp 87,363,000 dan memperoleh persentase penyerapan anggaran sebesar 38.6%. Pada semester II tahun 2021 realisasi belanja pegawai sebesar Rp 138,314,000 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 61.13%. Sementara pada semester I tahun 2022 jumlah anggaran belanja pegawai sebesar Rp259,695,000 dan terealisasi sebesar Rp 86,847,000 sehingga memperoleh persentase penyerapan anggaran sebesar 33.44%. Anggaran belanja pegawai pada KPPN Poso meliputi pembayaran uang makan dan uang lembur pegawai. Sementara untuk gaji dan tunjangan pegawai dilakukan secara terpusat.

Anggaran Pagu dan Realisasi Belanja Barang

Pada semester I Tahun 2021, anggaran pagu belanja barang merupakan komposisi belanja yang paling besar dalam DIPA Tahun 2021 pada KPPN Tipe A1 Poso yang mencapai Rp 1,284,351,000 yang sudah terealisasi sebesar Rp 652,962,028 dan memeperoleh persentase penyerapan anggaran sebesar 50.84%. Pada semester II tahun 2021 anggaran pagu belanja barang sebesar Rp 1,284,351,000 yang sudah terealisasi sebesar Rp 613,485,222 sehingga memperoleh persentase sebesar 47.77%. Sementara pada

semester 1 tahun 2022 anggaran pagu belanja barang sebesar Rp 1,274,243,000 dan realisasi sebesar Rp 638,527,153 sehingga memperoleh persentase penyerapan anggaran sebesar 50.11%. Anggaran belanja barang pada KPPN Poso meliputi pembayaran kegiatan acara tugas dan fungsi KPPN Poso, operasional perkantoran, kehumasan, pengembangan SDM, dll.

Anggaran Pagu dan Realisasi Belanja Modal

Pada semester I tahun 2021, anggaran pagu belanja modal pada KPPN Tipe A1 Poso sebesar Rp 900,817,000 yang sudah terealisasikan sebesar Rp 265,929,700 dan memperoleh persentase penyerapan anggaran sebesar 29.52%. Pada semester II tahun 2021 anggaran pagu belanja modal sebesar Rp 633,389,350 sehingga memperoleh persentase penyerapan anggaran sebesar 70.31%. sementara anggaran pagu belanja modal semester II tahun 2022 sebesar Rp 349,786,000 dan realisasinya sebesar Rp 19,284,190 sehingga memperoleh persentase penyerapan anggaran sebesar 5.51%. Anggaran belanja modal pada KPPN Tipe A1 Poso meliputi pembayaran rehabilitasi rumah dinas, rehabilitasi gedung kantor, dan perolehan aset tetap.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari KPPN Tipe A1 Poso tentang data anggaran belanja Tahun 2021 dan 2022 dari dokumentasi, penulis menemukan beberapa penyebab masalah yang patut dicari yaitu terdapat kendala dalam melakukan kegiatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran belanja pemerintah di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Poso.

Pembahasan

Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran di KPPN Poso

Berdasarkan data pagu dan realisasi anggaran belanja KPPN Tipe A1 Poso, selanjutnya dilakukan analisis tingkat realisasi penyerapan anggaran masing-masing belanja pemerintah pada tahun 2021 dan 2022.

Grafik:
Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran di KPPN Tipe A1 Poso

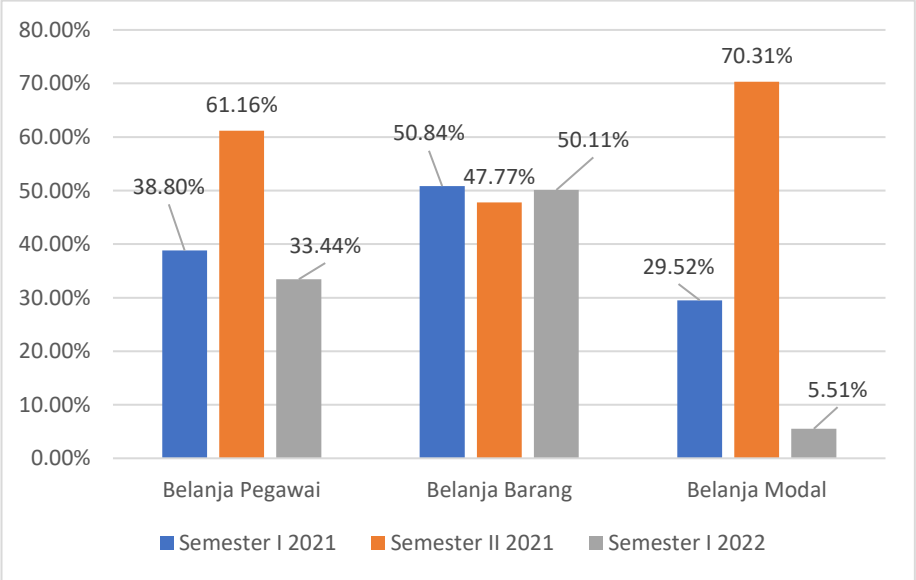

Berdasarkan data grafik dapat diketahui realisasi penyerapan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada semester I – II Tahun 2021 dan semester I Tahun 2022 maka akan terlihat jenis belanja pemerintah yang mengalami peningkatan dan penurunan. Selain melihat perbandingan Anggaran Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah pada Online Monitoring SPAN (OMSPAN) pada KPPN Poso, penulis juga menganalisis penyebab jenis belanja tersebut yang mengalami peningkatan dan penurunan.

Peningkatan dan penurunan per jenis belanja pada periode semester I-II Tahun 2022 dan semester II Tahun 2022 yang dianggarkan kemudian dianalisis, dan dari analisis ini diselidiki apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan dan penurunan pada pagu dan realisasi penyerapan anggaran di KPPN Tipe A1 Poso.

Setelah data pendukung didapat oleh penulis, maka penulis menganalisis data tersebut dengan metode yang ditentukan sebagaimana yang telah disebutkan di bab sebelumnya. Untuk mencari persentase capaian realisasi anggaran dengan cara :

$$\text{Capaian/Output} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Pagu Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.1.7 dapat dikatakan bahwa anggaran dan realisasi belanja pemerintah di KPPN Poso mengalami peningkatan dan penurunan. Berikut penyebab terjadinya peningkatan dan penurunan per jenis belanja, sebagai berikut:

Belanja Pegawai

Pada periode semester I tahun 2021 belanja pegawai memiliki anggaran sebesar Rp 226,272,000 sementara pada semester I tahun 2021 anggaran belanja pegawai sebesar Rp 259,695,000. Pada anggaran belanja pegawai di semester I tahun 2021 dan semester I tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 33,423,000. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 KPPN Poso mendapat tambahan pegawai baru sejumlah 6 orang sehingga anggaran belanja pegawai untuk pembayaran uang makan dan uang lembur pegawai selama tahun berjalan juga meningkat. Namun terjadi penurunan pada realisasi belanja pegawai di semester I tahun 2022 sebesar 33.44% atau sebesar Rp 86,847,000 dimana pada semester I tahun 2021 persentase realiasi anggaran sebesar 38.6% atau sebesar Rp 87,363,000. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut KPPN Poso terdapat 2 pegawai mutasi. Sehingga pembayaran uang makan dan uang lembur mengalami penurunan. Disamping itu pula, pada tahun 2022 pelaksanaan lembur di semester 1 tidak terlalu banyak. Sedangkan realiasi semester II tahun 2021 yang mengalami peningkatan tajam, hal ini dikarenakan pada semester II 2021 terdapat banyak kegiatan dan tugas fungsi KPPN Poso yang dilaksanakan di akhir tahun sehingga banyak pegawai yang melakukan lembur. Capaian/*output* persentase capaian realisasi anggaran dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Capaian/Output} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Pagu Belanja}} \text{ x } 100\%$$

a) Persentase tingkat realiasi anggaran belanja pegawai periode semester I Tahun 2021

$$\text{Capaian/Output} = \frac{87{,}363{,}000}{226{,}272{,}000} \text{ x } 100\% = 38.6\%$$

b) Persentase tingkat realisasi anggaran belanja pegawai periode semester II Tahun 2021

$$\text{Capaian/Output} = \frac{138{,}314{,}000}{226{,}272{,}000} \text{ x } 100\% = 61.13\%$$

c) Persentase tingkat realisasi angaran belanja pegawai periode semester I Tahun 2022

$$\text{Capaian/Output} = \frac{86{,}847{,}000}{259{,}695{,}000} \text{ x } 100\% = 33{,}44\%$$

Grafik A
Tingkat Realisasi Penyerapan anggaran Belanja Pegawai KPPN Tipe A1 Poso

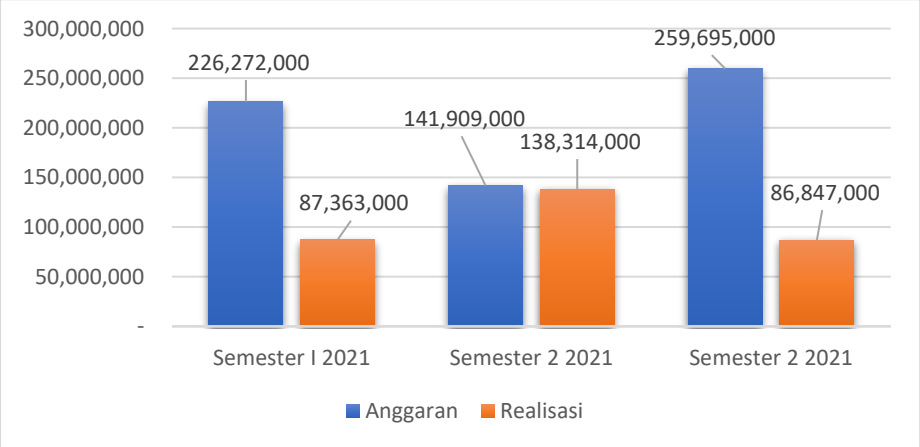

Belanja Barang

Pada semester I Tahun 2021 jumlah anggaran belanja barang sebesar Rp 1,284,351,000 sementara pada semester I tahun 2022 anggaran belanja barang sebesar 1,274,243,000. Sedangkan pada semester 1 tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp 652,962,028 sementara pada semester I tahun 2022 sebesar Rp 638,527,153. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja barang pada KPPN Tipe A1 Poso mengalami penurunan pada tahun 2022 dimana persentase realisasi anggaran periode semester I tahun 2021 sebesar 50.84% dan semester I Tahun 2022 sebesar 50,11%. Persentase tingkat realisasi anggaran dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Capaian/Output} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Pagu Belanja}} \text{ x } 100\%$$

a) Persentase tingkat realiasi anggaran belanja barang periode semester I Tahun 2021

$$\text{Capaian/Output} = \frac{652{,}962{,}028}{1{,}284{,}351{,}000} \text{ x } 100\% = 50.84\%$$

b) Persentase tingkat realisasi anggaran belanja barang periode semester II Tahun 2021

$$\text{Capaian/Output} = \frac{613{,}485{,}222}{1{,}284{,}351{,}000} \text{ x } 100\% = 47.77\%$$

c) Persentase tingkat realisasi angaran belanja barang periode semester I Tahun 2022

$$\text{Capaian/Output} = \frac{638{,}527{,}153}{1{,}274{,}243{,}000} \text{ x } 100\% = 50.11\%$$

Penurunan ini dikarenakan belanja barang PC-PEN menurun seiring dengan perkembangan kondisi pandemic Covid-19 yang terkendali. Selain itu, penurunan realisasi penyerapan anggaran ini disebabkan adanya efisiensi seiring penerapan pola kerja baru dan mengoptimalkan TIK. Berbagai kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Tipe A1 Poso yang dilaksanakan secara *offline*/langsung dan memerlukan perjalanan dinas harus tertunda dikarenakan perkembanngan kondisi pandemi Covid-19 yang mana dialihkan secara online.

Grafik B
Tingkat Realisasi Penyerapan anggaran Belanja Barang KPPN Tipe A1 Poso

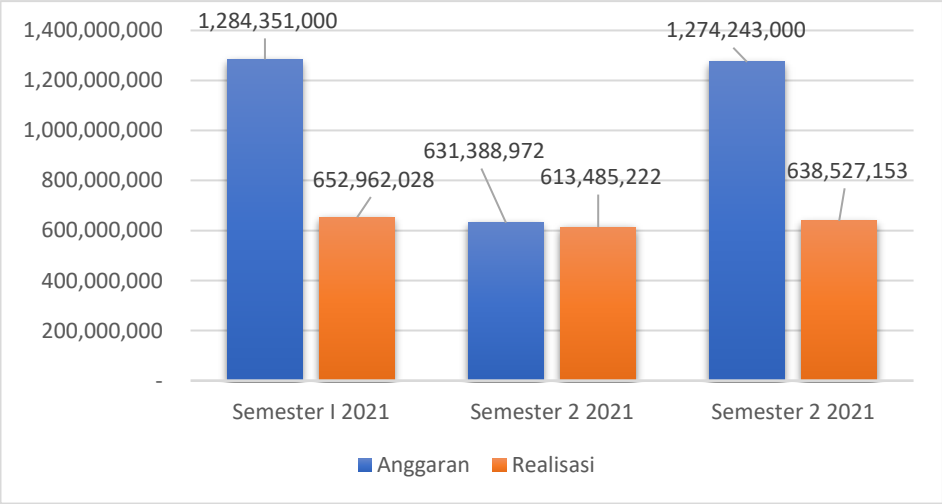

Belanja Modal

Pada periode semester 1 tahun 2021 anggaran belanja modal pada KPPN Tipe A1 Poso sebesar Rp 900,817,000 sementara periode semester 1 tahun 2022 sebesar Rp 349,786,000. Realisasi penyerapan anggaran belanja modal pada semester I tahun 2021 sebesar Rp 265,929,700 dan semester I tahun 2022 sebesar Rp 19,284,190. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada belanja modal di semester I tahun 2022

dibuktikan dengan persentase tingkat realisasi penyerapan anggaran semester I tahun 2021 sebesar 29.52% sedangkan pada semester I tahun 2022 sebesar 5.51%. Perhitungan persentase tingkat penyerapan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian/Output} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Pagu Belanja}} \text{ x } 100\%$$

a) Persentase tingkat realiasi anggaran belanja modal periode semester I Tahun 2021

$$\text{Capaian/Output} = \frac{265{,}929{,}700}{900{,}817{,}000} \text{ x } 100\% = 29.52\%$$

b) Persentase tingkat realisasi anggaran belanja modal periode semester II Tahun 2021

$$\text{Capaian/Output} = \frac{633{,}389{,}350}{900{,}817{,}000} \text{ x } 100\% = 70.31\%$$

c) Persentase tingkat realisasi angaran belanja modal periode semester I Tahun 2022

$$\text{Capaian/Output} = \frac{19{,}284{,}190}{349{,}786{,}000} \text{ x } 100\% = 5.51\%$$

Penurunan tersebut dikarenakan oleh pengerjaan rehabilitasi rumah dinas yang terhambat. Realisasi belanja modal di tahun 2022 semester I kurang optimal karena progress pengerjaan rehabilitasi rumah dinas KPPN Tipe A1 Poso mengalami hambatan dari segi mobilisasi bahan material dan juga SDM nya, hal ini tidak luput juga dari faktor alam yang sering terjadi seperti musim hujan di daerah Poso. Namun dari data tabel 4.1.7 terlihat di semester II tahun 2021 realisasi anggaran belanja modal mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 KPPN Tipe A1 Poso melakukan rehabilitasi Gedung kantor sesuai dengan layout ruang kerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan, pengerjaan rehabilitasi tersebut dilakukan pada semester II Tahun 2021 dan selesai pada bulan Maret 2022.

Grafik C
Tingkat Realisasi Penyerapan anggaran Belanja Modal KPPN Tipe A1 Poso

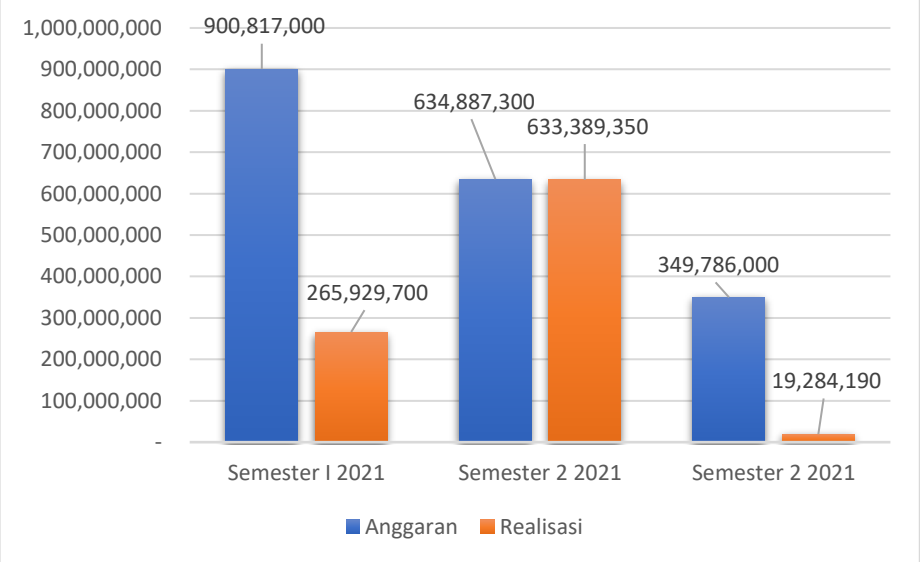

Untuk dapat mengetahui tingkat efektivitas realisasi penyerapan anggaran, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 bahwa kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja pemerintah adalah sebagai berikut.

Kriteria Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja

Persentase Pengukuran	Keterangan Kriteria Efektivitas
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% s.d. 100%	Efektif
80% s.d. 90%	Cukup Efektif
60% s.d. 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

Dari kriteria efektivitas realisasi anggaran belanja tersebut sebagai tolak ukur efektif atau tidaknya realisasi penyerapan anggaran, dapat dikatakan bahwa tingkat persentase realisasi anggaran pada KPPN Tipe A1 Poso per jenis belanja pemerintah menunjukkan hasil kriteria cenderung kurang efektif. Dimana realisasi yang dihasilkan tidak terserap secara optimal dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan.

Secara keseluruhan dari hasil analisis per jenis belanja pemerintah diatas dapat dikatakan bahwa realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah mengalami penurunan pada tahun 2022 sejalan dengan capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang terdiri dari 13 indikator salah satunya adalah penyerapan anggaran. Hal ini ditandai dengan adanya tingkat penurunan persentase penyerapan anggaran pada semester I tahun 2021 dan semester I tahun 2022 sebesar 39.53%. Nilai yang dihasilkan dari indikator kinerja pelaksanaan anggaran juga menurun karena adanya kenaikan bobot nilai yang sebelumnya 15% menjadi 20% sehingga pada semester 1 tahun 2021 memperoleh nilai 100 sedangkan pada semester I tahun 2022 sebesar 96.17. Pola penyerapan seperti ini dikarenakan adanya faktor dari internal maupun eksternal unit organisasi.

Berikut ini adalah data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Tipe A1 Poso per semester di tahun 2021 dan 2022:

Gambar
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2021

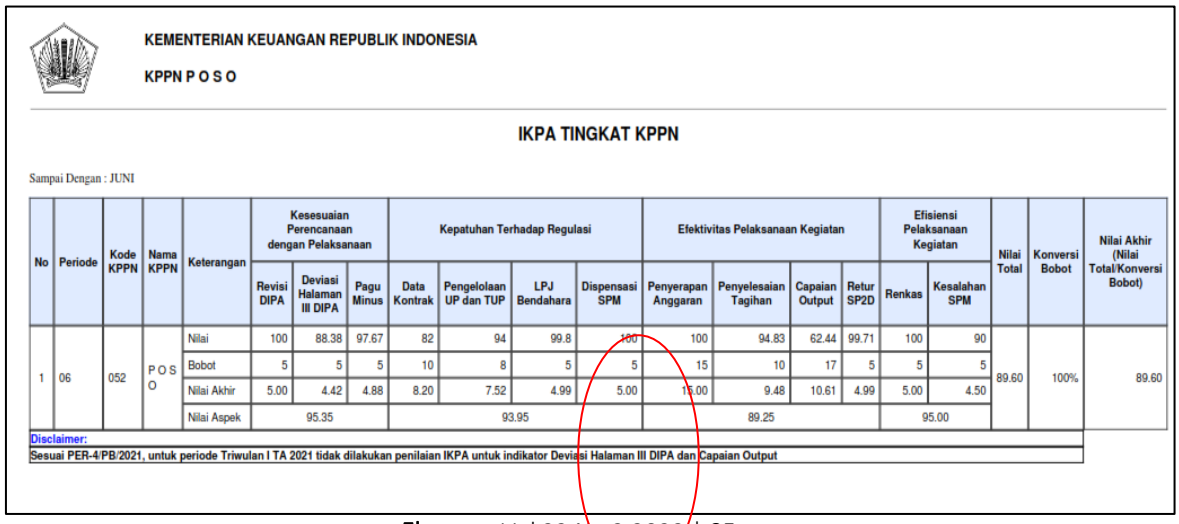

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KPPN P O S O

IKPA TINGKAT KPPN

Sampai Dengan : JUNI

No	Periode	Kode KPPN	Nama KPPN	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	06	052	P O S O	Nilai	100	88.38	97.67	82	94	99.8	100	100	94.83	62.44	99.71	100	90	89.60	100%	89.60
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	5	5			
				Nilai Akhir	5.00	4.42	4.88	8.20	7.52	4.99	5.00	15.00	9.48	10.61	4.99	5.00	4.50			
				Nilai Aspek	95.35			93.95				89.25				95.00				

Disclaimer:
Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Sumber: Online Monitoring SPAN (OMSPAN) tahun 2021

Gambar
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) semester I Tahun 2022

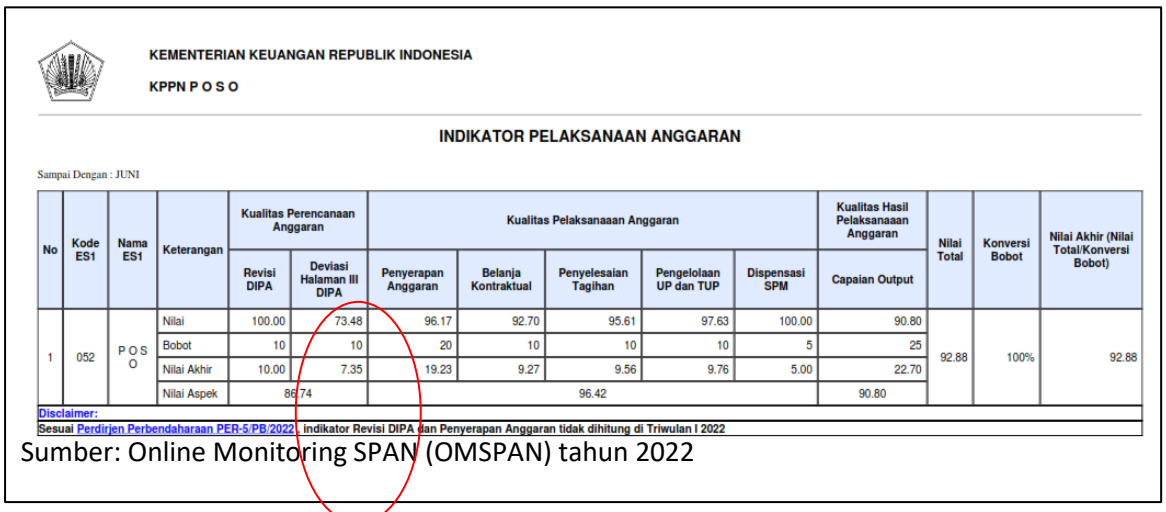

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KPPN P O S O

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	052	P O S O	Nilai	100.00	73.48	96.17	92.70	95.61	97.63	100.00	90.80	92.88	100%	92.88
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	7.35	19.23	9.27	9.56	9.76	5.00	22.70			
			Nilai Aspek	86.74		96.42					90.80			

Disclaimer:
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Sumber: Online Monitoring SPAN (OMSPAN) tahun 2022

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyerapan anggaran KPPN Poso

Dalam rangka mendorong peningkatan realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Poso di waktu mendatang, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dan dioptimalkan:

1. Perencanaan Kas Yang Berkualitas
   Faktor yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja pemerintah salah satunya ialah permasalahan pada perencanaan anggaran. Permasalahan perencanaan anggaran yang sering ditemui adalah banyaknya perencanaan yang tidak berkualitas, akibatnya dilakukan revisi DIPA. Revisi DIPA memerlukan waktu untuk dilaksanakan atau mengalami penunda yang ada pada akhirnya mempengaruhi penyerapan. Maka hal yang perlu diperhatikan dalam mendorong penyerapan anggaran yaitu strategi perencanaan yang matang dan akurat.
2. Perencanaan SDM yang kompeten
   Tersedianya SDM yang kompeten sangat penting dalam mendukung peningkatan realisasi penyerapan anggaran di KPPN Tipe A1 Poso. Dalam implementasinya penyerapan anggaran melewati berbagai tahap dan alur proses. Mulai dari perencanaan anggaran, pembelian barang dan jasa yang saat ini mulai banyak yang menggunakan platform *e-commerce*, pembayaran belanja barang dan jasa yang tunai dan non tunai, penggunaan aplikasi perbendaharaan dalam memproses surat perintah membayar (SPM) hingga terbitnya surat perintah pencairan dana (SP2D). Alur proses yang panjang tersebut sangat membutuhkan SDM yang kompeten, memiliki keahlian dan pengetahuan yang baik dalam melaksanakannya.
3. Pemilihan vendor atau rekanan dalam operasional kegiatan secara handal.

Pejabat pengadaan barang dan jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan seleksi vendor atau rekanan dengan mempertimbangkan kriteria mulai dari kemampuan teknis, kapasitas produksi, SDM, lokasi, harga, dan tingkat resiko.

4. Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan anggaran dan realisasi penyerapan belanja penting untuk di perhatikan bilamana terdapat perubahan perubahan kebijakan baru. Pemangku kepentingan dan pengelola keuangan pada suati unit organisasi harus melakukan *update* terkait dengan petunjuk teknis atau peraturan yang berlaku.

Peningkatan pemenuhan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyerapan anggaran dapat mendukung percepatan realiasi penyerapan anggaran.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarikan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya yang telah dilakukan analisis terhadap data pagu dan realisasi anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan selama periode semester I dan II Tahun 2021 dan periode semester I Tahun 2022, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah secara keseluruhan mengalami penurunan di Tahun 2022 semester I dan perencanaan strategi KPPN Poso dalam penyerapan anggaran belum optimal.
2. Meskipun mengalami penuruan pada periode semester I Tahun 2022, namun realisasi pelaksanaan angggaran KPPN Tipe A1 Poso dapat dikatakan bahwa tingkat kualitas penyerapan anggaran tahun 2021 dan 2022 melebihi target sebesar 95,5% dan masih tergolong sangat baik.
3. Penyerapan pembelian barang dan jasasedikit terhambat dikarenakan banyak vendor atau pihak ketiga di wilayah setempat dimana barang yang dibutuhkan tidak tersedia sehingga harus melakukan pemesanan di luar kota.
4. Penyerapan belanja modal yang berhubungan langsung dengan kontrak dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan menjadi penyebab terhambatnya penyerapan anggaran, dimana pekerjaan terhambat karena kontraktor memiliki kendala dalam pengedaan material dan pekerja.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diambil, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan anggaran dengan sebaik mungkin dan akurat berdasarkan skala utama kebutuhan unit organisasi supaya tidak terjadi revisi DIPA yang berulang karena adanya ketidaksesuaian anggaran dan realisasi anggaran.
2. Realisasi penyerapan anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Posodapat dipertahankan dengan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sehingga mendorong percepatan kinerja indikator lainnya yang dapat mendukung peningkatan kualitas penyerapan anggaran di KPPN Tipe A1 Poso

3. 3Melakukan seleksi pemilihan vendor atau pihak ketiga sebelum dilakukannya pembelian barang dan jasa. Serta melakukan peningkatan kualitas SDM yang kompeten di bidang pengadaan barang/jasa dan pengelolaan keuangan. Salah satu caranya yaitu mengusulkan para pegawai untuk mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan pelatihan terkait keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh instansi. Pegawai dapat juga melakukan pemanfaatan secara elektronik dalam melakukan pemesanan seperti e-commerce atau digipay.
4. Melakukan percepatan belanja modal yang terdapat kontrak pekerjaan dengan pihak ketiga seperti pembangunan atau pemeliharaan gedung bangunan kantor maupun rumah dinas. Pengawas pekerjaan rehabilitasi dimana dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen harus melakukan pengawasan pekerjan rehabilitasi gedung dan bangunan. Dan menyiapkan rencana stategi alternatif lain jika rencana utama mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

Azwar. 2016. Kajian Ekonomi Keuangan Vol. 20 No. 2. Jakarta.: Jurnal Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Bunna, Cici Sitti Hajaerah. 2021. Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Carsidiawan, Didi. 2008. Mengungkap Penyebab Lambatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah. Online. (https://didicarsidiawan.wordpress.com/2009/04/29/mengungkap-penyebab-lambatnya-penyerapan-anggaran-belanja-pemerintah/) diakses pada 8 Agustus 2022.

Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin.2007. Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kuswoyo, Iwan Dwi. 2011. Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada.

KPPN Kota Bumi.2021. Klasifikasi Anggaran. (Online). (https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-kppn/klasifikasi-anggaran.html) , diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

KPPN Pematang Siantar.2021. Tugas dan Fungsi Perseksi. (Online). (https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar/id/profil/standar/114-profil/2700-tugas-dan-fungsi.html#:~:text=KPPN%20Tipe%20A1%20memiliki%20tugas,negara%20berdasarkan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

KPPN Poso.2021. Sejarah KPPN Poso. (Online). (https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/poso/id/profil/sejarah.html), diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

Priatno, Prasetyo Adi.2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Malang: Universitas Brawijaya.

Rahmawati, Rika Septi. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. Bandung: Indonesian Accounting Research Journal.

Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Sigalingging, Fahnur Anggaraini.2018. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Medan II Tahun Anggaran 2017. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung : CV. Alfabet.

Suheri.2019.Analisiss Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Angama Kota Subulusalam Tahun 2018.Medan: Bagian Penerbitan Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Yunus, Rita, dan Anas Iswanto Anwar.2021. Ekonomi Publik. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.